



**PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 23 TAHUN 2023**

**RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2024**

NOMOR : 23 /RENJA-BAPPEDA/2023

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE



**WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2024**

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2024, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 85);
14. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2024

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Wali Kota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas, Badan dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan.

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK.
13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disebut Renstra-SKPK adalah Dokumen Perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Musyawarah Rencana Pembangunan, Anggaran Pendapatan Belanja Kota.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Renja PD Tahun 2024 memuat Program dan Kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.

- (3) Renja PD Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
- (4) Renja PD Tahun 2024 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - d. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - e. Bab V : Penutup
- (2) Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Nomor Renja PD Tahun 2024 , sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 28 Agustus 2023 M
11 safar 1445 H

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,



IMRAN

Diundangkan di Lhokseumawe

pada tanggal 28 Agustus 2023 M
11 safar 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,



T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR 23 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA
 LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN URUTAN NOMOR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NOMOR RENJA	PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4
1	01/RENJA-MPD/2023	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	
2	02/RENJA-PK/2023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	03/RENJA-DINKES/2023	Dinas Kesehatan	
4	04/RENJA-PUPR/2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
5	05/RENJA-BPBD/2023	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
6	06/RENJA-SATPOL PPWH/2023	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	
7	07/RENJA-DINSOS/2023	Dinas Sosial	
8	08/RENJA-DP3AP2KB/2023	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	
9	09/RENJA-DISTANAH/2023	Dinas Pertanahan	
10	10/RENJA-DLH/2023	Dinas Lingkungan Hidup	
11	11/RENJA-DISDUKCAPIL/2023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
12	12/RENJA-DPMG/2023	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
13	13/RENJA-DISHUB/2023	Dinas Perhubungan	
14	14/RENJA-DISKOMINFO/2023	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	
15	15/RENJA-DPMPTSP NAKER/2023	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
16	16/RENJA-DISPORAPAR/2023	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	

17	17/RENJA-MAA/2023	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
18	18/RENJA-DISPUSIP/2023	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
19	19/RENJA-DKPPP/2023	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
20	20/RENJA-DISPERINDAGKOP/2023	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
21	21/RENJA-SETDAKO/2023	Sekretariat Daerah	
22	22/RENJA-SETWAN/2023	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota	
23	23/RENJA-BAPPEDA/2023	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
24	24/RENJA-BPKD/2023	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
25	25/RENJA-BKPSDM/2023	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
26	26/RENJA-INSPEKTORAT/2023	Inspektorat	
27	27/RENJA-BANDA SAKTI/2023	Kecamatan Banda Sakti	
28	28/RENJA-BLANG MANGAT/2023	Kecamatan Blang Mangat	
29	29/RENJA-MUARA SATU/2023	Kecamatan Muara Satu	
30	30/RENJA-MUARA DUA/2023	Kecamatan Muara Dua	
31	31/RENJA-KESBANGPOL/2023	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
32	32/RENJA-MPU/2023	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
33	33/RENJA-BAITUL MAL/2023	Sekretariat Baitul Mal	
34	34/RENJA-DSIPD/2023	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,



IMRAN

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024 YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BAPPEDA KOTA LHOKASEUMAWE

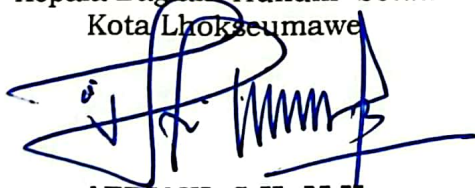
Pada hari ini, Jum'at tanggal Delapan belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini (mewakili seluruh anggota tim verifikasi rencana kerja perangkat daerah) telah menyelesaikan kegiatan verifikasi atas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Lhokseumawe Tahun 2024.

Renja-PD Kota Lhokseumawe Tahun 2024 telah diverifikasi meliputi:

1. Keselarasan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPK, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi;
2. Program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah;

Selanjutnya Renja-PD yang telah dilakukan verifikasi harus ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Lhokseumawe.

Kepala Bagian Hukum Setda
Kota Lhokseumawe



AFRIANI, S.H., M.H

Nip. 19810417 200604 2 005

Lhokseumawe, 18 Agustus 2023
Kepala BAPPEDA Kota Lhokseumawe



MULYANTO, S.Sos

Nip. 19630807 198708 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-5
1.3 Maksud dan Tujuan	I-8
1.4 Sistematika Penulisan	I-9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..	II-12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPK	II-16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-17
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah..	III-3
3.3 Program dan Kegiatan	III-5
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Kota Lhokseumawe	II-11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah...	II-14
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2024.....	II-17
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	II-18
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.	III-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	I-3
Gambar 1.1	Keterkaitan Dokumen Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari Renstra dalam satu tahun anggaran, dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Proses untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Proses penyusunan renja dimulai dengan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi. Selanjutnya, menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Kemudian perumusan tujuan dan sasaran dihasilkan melalui review atas evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Penyusunan Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta penelaahan dari rancangan

awal RKPD. Lebih lanjut, perumusan program dan kegiatan didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan musrenbang dan hasil reses anggota DPRD.

Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe melalui tahapan – tahapan sebagai berikut :

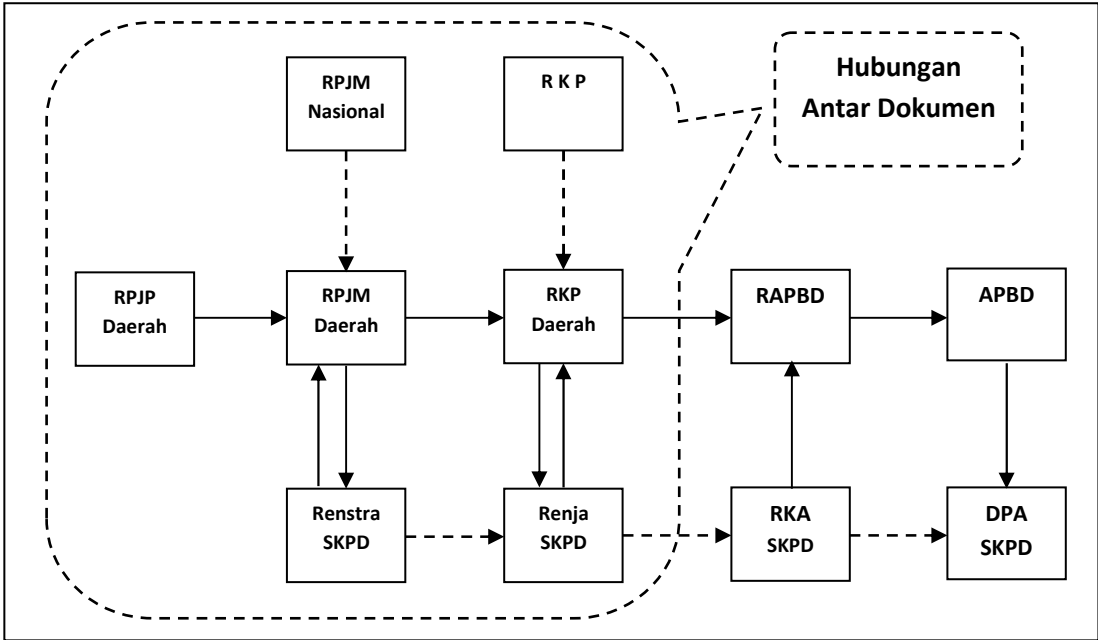
- 1) Persiapan penyusunan
 - Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024
 - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja 2023, pengendalian kegiatan Tahun 2023, dan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023)
- 2) Penyusunan rancangan awal
 - Koordinasi dengan Bidang, Pejabat Fungsional Perencana dan Peneliti
 - Desk dengan pengampu kegiatan
- 3) Penyusunan rancangan
 - Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024
 - Masukan dari pelaksana kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe
- 4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - Melaksanakan FGD dengan mengundang : DPRD, OPD terkait, Perguruan Tinggi, dan Pemangku Kepentingan yang terkait
- 5) Perumusan rancangan akhir
 - Penyempurnaan oleh Tim
 - Diverifikasi oleh Tim Bappeda
- 6) Penetapan

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah



Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 adalah penjabaran dari Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe 2023-2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2024. Selain itu dokumen lain yang dijadikan perhatian dalam penyusunan adalah RPK Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

Gambar 1.2
Keterkaitan Dokumen Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lain seperti RKPD dan Renstra Perangkat Daerah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan yang ada di atasnya seperti RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD. Renja Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah secara terpadu, partisipasi dan demokratis. Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk menyusun Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan Pemerintah Kota Lhokseumawe mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Tahun 2024.
2. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk

mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2012-2032;
15. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2012-2032;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026
17. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;
18. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025;
19. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
20. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe 2023-2026;
22. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 87 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2024;
24. Surat Edaran Walikota Lhokseumawe Nomor 050/3/SE/2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

I.3. Maksud Dan Tujuan

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2024 disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam perangkat daerah

serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan :

1. penyediaan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda 2024.
2. menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional.
3. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah.
4. mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
5. menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.

- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPK
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Lhokseumawe melaksanakan 4 program, 15 kegiatan dan 39 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- 1) program penunjang urusan pemerintah daerah, dengan 7 kegiatan dan 16 sub kegiatan;
- 2) program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dengan 3 kegiatan dan 10 sub kegiatan;
- 3) program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, dengan 3 kegiatan dan 10 sub kegiatan;
- 4) program penelitian dan pengembangan daerah, dengan 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan;

Target anggaran Renja Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2022 adalah Rp.6.516.537.597,- sedangkan realisasi anggaran Renja Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2022 adalah Rp.6.307.993.034,- sehingga persentase realisasi anggaran Renja Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2022 adalah sebesar 96,8% yang termasuk dalam kategori predikat sangat tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2022 yang mengacu pada Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2022, uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

A. Realisasi yang tidak memenuhi target kinerja

Pada tahun anggaran 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe mampu menargetkan semua capaian kinerja sehingga realisasi anggaran terserap dengan baik.

B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :

a. program penunjang urusan pemerintah daerah, terdiri dari 7 kegiatan dan 16 sub kegiatan yaitu:

1. kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, 1 sub kegiatan:

- penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 15.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.583.600,- atau 54,7% dengan output jumlah dokumen buku renja, renja perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan dan LKjIP Bappeda Kota Lhokseumawe sebanyak 7 dokumen atau 100%.

2. kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, 1 sub kegiatan:

- penyediaan gaji dan tunjangan ASN dari rencana anggaran sebesar Rp. 4.513.579.319,- terealisasi sebesar Rp. 4.474.012.195,- atau 99,1% dengan output jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN 840 OB (orang bulan) selama 12 bulan, terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

3. kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, 1 sub kegiatan:

- pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dari rencana anggaran sebesar Rp. 16.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau 93,8% dengan output frekuensi pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 10 kali.

4. kegiatan administrasi umum perangkat daerah, 5 sub kegiatan:

- penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 43.067.600,- terealisasi sebesar Rp. 42.388.500,- atau 98,4%

dengan output jumlah jenis alat kantor, peralatan listrik dan bahan kebersihan yang disediakan 80 jenis selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

- penyediaan bahan logistik kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 31.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 30.450.000,- atau 97,6% dengan output jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan sebanyak 1150 porsi selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
 - penyediaan barang cetakan dan penggandaan dari rencana anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar Rp.18.876.000,- atau 75,5% dengan output jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan sebanyak 30 jenis selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
 - penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.140.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.140.000,- atau 100% dengan output jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (2 eks x 365 hari) sebanyak 750 eks terealisasi sebanyak 750 eks atau 100%.
 - penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD dari rencana anggaran sebesar Rp.218.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 217.414.992,- atau 99,9% dengan output frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
5. kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, 1 sub kegiatan:
- pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dari rencana anggaran sebesar Rp.48.523.100,- terealisasi sebesar Rp. 47.800.000,- atau 98,5% dengan output jumlah

pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya sebanyak 8 unit selama 12 bulan atau 100%.

6. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, 3 sub kegiatan:

- penyediaan jasa surat menyurat dari rencana anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau 100% dengan output jumlah surat yang dikirim 30 surat selama 12 bulan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.
- penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dari rencana anggaran sebesar Rp. 216.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 168.756.327,- atau 78,0% dengan output periode penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik 12 Bulan terealisasi selama 12 Bulan atau 100%.
- penyediaan jasa pelayanan umum kantor dari rencana anggaran sebesar Rp. 321.332.480,- terealisasi sebesar Rp. 306.811.500,- atau 95,5% dengan output jumlah pejabat pengelola keuangan OPD (26 orang x 12 bulan) dan jumlah jasa pegawai tidak tetap (33 org x 12 bulan) sebanyak 708 OB (orang bulan) terealisasi sebanyak 708 OB atau 100%.

7. kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, 4 sub kegiatan:

- penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 34.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 32.919.800,- atau 96,5% dengan output jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan sebanyak 1 unit selama 12 bulan atau 100%.
- penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dengan anggaran sebesar Rp.

54.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 52.921.500,- atau 98,0% dengan output jumlah pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebanyak 2 unit selama 12 bulan atau 100%.

- pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana kantor atau bangunan lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 63.766.000,- terealisasi sebesar Rp. 63.457.000,- atau 99,5% dengan output jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana kantor atau bangunan selama 12 bulan atau 100%.
 - pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 51.885.800,- terealisasi sebesar Rp. 49.705.000,- atau 97,75% dengan output jumlah pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana kantor atau bangunan selama 12 bulan atau 100%.
- b. program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dengan 3 kegiatan dan 10 sub kegiatan yaitu:
1. penyusunan perencanaan dan pendanaan, 6 sub kegiatan:
 - koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 40.307.120,- terealisasi sebesar Rp. 37.672.900,- atau 93,5% dengan output jumlah laporan verifikasi renja OPD dan perubahan renja OPD sebanyak 10 laporan Selama 12 bulan atau 100%.
 - pelaksanaan konsultasi publik, dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.457.780,- atau 81,8% dengan output jumlah pelaksanaan konsultasi publik sebanyak 4 laporan terealisasi selama 12 bulan atau 100%.

- koordinasi pelaksanaan forum OPD/lintas OPD dengan anggaran sebesar Rp. 16.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.099.820,- atau 43,6% dengan output jumlah laporan pelaksanaan forum OPD/lintas OPD sebanyak 3 laporan selama 12 bulan atau 100%.
 - pelaksanaan Musrenbang kabupaten/kota rencana anggaran sebesar Rp. 70.734.180,- terealisasi sebesar Rp. 68.166.400,- atau 96,4% dengan output frekuensi pelaksanaan Musrenbang Kota Lhokseumawe selama 1 hari atau 100%.
 - penyiapan bahan koordinasi Musrenbang kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi sebesar Rp.1.752.800,- atau 17,5% dengan output jumlah laporan pelaksanaan koordinasi Musrenbang kecamatan sebanyak 4 laporan selama 12 bulan atau 100%.
 - koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kab/kota rencana anggaran sebesar Rp. 148.795.150,- terealisasi sebesar Rp. 133.592.420,- atau 89,8% dengan output jumlah buku RKPD dan RKPD-P sebanyak 55 buku selama 12 bulan atau 100%.
2. analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, 2 sub kegiatan:
- analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah rencana anggaran sebesar Rp.71.911.600,-teralisasi sebesar Rp. 63.902.100,- atau 88,9% dengan output jumlah dokumen DOKA murni sebanyak 20 buku, dokumen usulan APBA/APBN sebanyak 15 buku dan jumlah dokumen RK DAK sebanyak 10 buku selama 12 bulan atau 100%.
 - pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan OPD rencana anggaran sebesar Rp. 41.437.280,- terealisasi sebesar Rp.

37.427.200.- atau 90,3% dengan output jumlah laporan pengelolaan e-planning OPD Kota Lhokseumawe sebanyak 5 laporan selama 12 bulan atau 100%.

3. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, 2 sub kegiatan ;
 - koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kab/kota, rencana anggaran sebesar Rp. 109.744.448.- terealisasi sebesar Rp. 98.360.600.- atau 89,6% dengan output jumlah buku hasil evaluasi RPKK sebanyak 10 buku selama 12 bulan atau 100%.
 - monitoring evaluasi dan penyusunan, rencana anggaran sebesar Rp. 35.155.300.- terealisasi sebesar Rp. 23.514.700.- atau 66,9% dengan output jumlah buku laporan monitoring pembangunan sebanyak 10 buku dan buku laporan sismonteptra sebanyak 10 buku selama 12 bulan atau 100%.
- c. program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, terdiri dari 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan yaitu:
 1. kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, 1 sub kegiatan:
 - koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia rencana anggaran sebesar Rp. 67.057.260.- terealisasi sebesar Rp. 65.436.450.- atau 97,6% dengan output jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia sebanyak 12 laporan selama 12 atau 100%.
 2. kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), 4 sub kegiatan:

- koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD) rencana anggaran sebesar Rp. 32.071.060,- terealisasi sebesar Rp. 31.650.300.- atau 98,7% dengan output jumlah buku RPJPD, RPJMD, RKPD dan Laporan kegiatan TKPK sebanyak 1 laporan buku selama 12 bulan atau 100%.
 - asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian rencana anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.679.000.- atau 91,2% dengan output jumlah buku RPJPD, RPJMD, RKPD dan laporan survai ketahanan pangan sebanyak 1 laporan selama 12 bulan atau 100%.
 - pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian rencana anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.960.000.- atau 86,4% dengan output jumlah buku RPJPD, RPJMD, RKPD dan laporan survai UMKM sebanyak 1 laporan selama 12 bulan atau 100%.
 - pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA rencana anggaran sebesar Rp. 24.650.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.630.500.- atau 99,9% dengan output jumlah buku RPJPD, RPJMD, RKPD dan laporan kegiatan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA sebanyak 1 laporan selama 12 bulan atau 100%.
3. kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan, 3 sub kegiatan:
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur rencana anggaran

sebesar Rp. 37.800.00.- terealisasi sebesar Rp. 37.553.300.- atau 99,3% dengan output jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur sebanyak 1 laporan selama 12 bulan atau 100%.

- koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur rencana anggaran sebesar Rp. 37.650.000.- terealisasi sebesar Rp. 36.806.250.- atau 97,8% dengan output jumlah laporan kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur sebanyak 1 laporan selama 12 bulan atau 100%.
 - koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan rencana anggaran sebesar Rp. 15.000.000.- terealisasi sebesar Rp. 14.654.600.- atau 97,7% dengan output jumlah laporan kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan sebanyak 1 laporan selama 12 bulan atau 100%.
- d. program penelitian dan pengembangan daerah, dengan 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan yaitu:
1. kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, 2 sub kegiatan:
 - pengelolaan data kelitbang dan peraturan rencana anggaran sebesar Rp. 15.000.000.- terealisasi sebesar Rp. 14.785.000.- atau 98,6% dengan output rentang waktu pengelolaan data melalui website Bappeda selama 12 bulan atau 100%.

- fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan rencana anggaran sebesar Rp. 15.000.000.- terealisasi sebesar Rp. 14.797.800.- atau 98,5%, dengan output jumlah laporan e-database informasi pembangunan daerah sebanyak 15 laporan dan laporan pemetaan indeks daya saing daerah sebanyak 5 laporan selama 12 bulan atau 100%.
2. kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, 1 sub kegiatan:
- penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah rencana anggaran sebesar Rp. 16.229.900,- terealisasi sebesar Rp. 15.884.700,- atau 97,9% dengan output jumlah buku penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah sebanyak 25 buku selama 12 bulan atau 100%.
- C. Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tahun anggaran 2022 pada Bappeda Kota Lhokseumawe.
- Pada Tahun 2022 tidak program/kegiatan yang melebihi dari target kinerja yang ditetapkan.
- D. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya target kinerja program/kegiatan.
- Tidak ada faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan pada Tahun 2022 karena semua program/kegiatan tercapai dan terpenuhi target kinerjanya.
- E. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Bappeda Kota Lhokseumawe.
- Dengan terlaksananya program/kegiatan Bappeda Tahun 2022 telah mendukung pencapaian kinerja Bappeda seperti:
- Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada bisa tercapai 100%, hal ini disebabkan karena semua program kegiatan dan sub kegiatan terlaksana sesuai dengan yang di rencanakan.

Program dan anggaran yang mendukung pencapaian target kinerja Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada adalah Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

- Penjabaran Konsistensi Program RPJMK ke dalam RKPK bisa tercapai 100%, hal ini disebabkan karena semua program kegiatan dan sub kegiatan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

Program dan anggaran yang mendukung pencapaian target kinerja Penjabaran Konsistensi Program RPJMK ke dalam RKPK adalah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah.

- Peningkatan akuntabilitas data kelitbangan dan peraturan realisasinya bisa tercapai 100%, hal ini disebabkan karena semua program kegiatan dan sub kegiatan terlaksana dengan sesuai dengan yang direncanakan.

Program dan anggaran yang mendukung pencapaian target kinerja Meningkatnya akuntabilitas data kelitbangan dan peraturan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Faktor penyebab tercapainya kinerja semua program/kegiatan Bappeda Kota Lhokseumawe pada Tahun 2022 adalah karena penyusunan rencana anggaran khususnya pada input/sumber daya yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan disesuaikan dengan target kinerja yang ingin dicapai.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2022 dan pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1. di bawah ini.

TABEL 2.1
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LHOKEUMAWÉ

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RENSTRA pada Tahun 2021 s/d 2022 (RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA 5/D Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10	12=11/8	13 = 7+11	14=13/6*100%	15	16											
		5																								
		5																								
		5	01																							
		5	01	2.01																						
		5	01	2.01	01																					
		5	01	2.01	02																					
		5	01	2.01	03																					
		5	01	2.01	04																					
		5	01	2.01	05																					
		5	01	2.01	06																					
		5	01	2.02																						
		5	01	2.02	01																					
		5	01	2.02	05																					
		5	01	2.02	07																					
		5	01	2.02	08																					
		5	01	2.03																						
		5	01	2.03	05																					
		5	01	2.05																						
		5	01	2.05	01																					
		5	01	2.05	02																					

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RENSTRA pada Tahun 2021 s/d 2022 (RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA 5/D Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket					
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp			K	Rp			
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8		13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kali	10	64,470,000	10	11,500,000	10	16,000,000	1	3,500,000	9	11,500,000	10	15,000,000	100.00%	93.75%	<	20	26,500,000	200.00%	41.10%	BAPPEDA	P	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kali	5	29,400,000						-			-	0.00%	0.00%	<	-	-	0.00%	0.00%	BAPPEDA	K		
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)	25.00%	23.44%				50.00%	10.28%	BAPPEDA			
																		Predikat Kinerja	SR	SR				SR	SR	BAPPEDA			
		5	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	95	991,913,350	12	254,190,613	12	260,340,000	6	96,502,318	6	213,767,174	12	310,269,492	100.00%	119.18%		24	564,460,105	25.26%	56.91%	BAPPEDA	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor, Peralatan Listrik dan Bahan Kebersihan Yang Disediakan	Jenis	80	160,902,000	80	32,359,780	80	30,000,000	20	5,275,600	60	37,112,900	80	42,388,500	100.00%	141.30%	>	160	74,748,280	200.00%	46.46%	BAPPEDA	P
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang Disediakan	Porsi	1150	98,710,410	1,150	21,575,000	1150	24,200,000	573	7,725,000	577	22,725,000	1150	30,450,000	100.00%	125.83%	>	2,300	52,025,000	200.00%	52.70%	BAPPEDA	P
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Laporan yang Ditetakan dan Digandakan	Jenis	30	63,900,940	30	25,278,500	30	25,000,000	0	-	30	18,876,000	30	18,876,000	100.00%	75.50%	<	60	44,154,500	200.00%	69.10%	BAPPEDA	P
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (2 Eks x 365 Hari)	Eks	730	5,900,000	730	1,140,000	730	1,140,000	365	475,000	365	665,000	730	1,140,000	100.00%	100.00%	>	1,460	2,280,000	200.00%	38.64%	BAPPEDA	P
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan	Jenis	5	63,000,000	-	-	0	0	-			0	-	0.00%	0.00%	<	-	-	0.00%	0.00%	BAPPEDA	K	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kali	60	599,500,000	60	173,837,333	60	180,000,000	20	83,026,718	40	134,388,274	60	217,414,992	100.00%	120.79%	>	120	391,252,325	200.00%	65.26%	BAPPEDA	P
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)	83.33%	93.90%				166.67%	45.36%	BAPPEDA			
																		Predikat Kinerja	T	ST				ST	SR	BAPPEDA			
		5	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	Persen	95	1,107,524,790	3	15,802,000	3	295,042,250	1	15,000,000	2	32,800,000	3	47,800,000	100.00%	16.20%		6	63,602,000	6.32%	5.74%	BAPPEDA	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Unit	12	522,989,790	-	-	12	112,134,000		-			-	0.00%	0.00%	<	-	-	0.00%	0.00%	BAPPEDA	K	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Unit	4	167,500,000	-	-	0	0		-			-	0.00%	0.00%	<	-	-	0.00%	0.00%	BAPPEDA	K	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis	15	417,035,000	15	15,802,000	15	182,908,250	1	15,000,000	14	32,800,000	15	47,800,000	100.00%	26.13%	<	30	63,602,000	200.00%	15.25%	BAPPEDA	P
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)	33.33%	8.71%				66.67%	5.08%	BAPPEDA			
																		Predikat Kinerja	SR	SR				S	SR	BAPPEDA			
		5	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Persen	95	1,341,028,410	12	448,596,500	12	553,932,480	6	217,812,096	6	260,755,731	12	478,567,827	100.00%	86.39%		24	927,164,327	25.26%	69.14%	BAPPEDA	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	Surat	30	7,875,000	30	3,134,000	30	3,000,000	15	860,000	15	2,140,000	30	3,000,000	100.00%	100.00%	>	60	6,134,000	200.00%	77.89%	BAPPEDA	P
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang Dibayar	Rekening	84	462,000,000	84	149,372,700	84	216,400,000	42	79,896,096	42	88,860,231	84	168,756,327	100.00%	77.98%	<	168	318,129,027	200.00%	68.86%	BAPPEDA	P
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pejabat Pengelola Keuangan OPD (26 org x 12 Bulan) dan Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap (33 org x 12 Bulan)	OB	708	871,153,410	708	296,089,800	708	334,532,480	354	137,056,000	354	169,755,500	708	306,811,500	100.00%	91.71%	<	1,416	602,901,300	200.00%	69.21%	BAPPEDA	P
																		354	100.00%	89.90%				200.00%	71.99%	BAPPEDA			
																		Predikat Kinerja	ST	T				ST	S	BAPPEDA			
		5	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terjaganya Nilai Ekonomis Barang Milik Daerah	Persen	95	2,442,146,055	4	118,735,000	4	239,342,500	2	28,017,000	2	170,986,300	4	199,003,300	100.00%	83.15%		8	317,738,300	8.42%	13.01%	BAPPEDA	

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RENSTRA pada Tahun 2021 s/d 2022 (RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA 5/D Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket					
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp			K	Rp			
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8		13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan (1 unit x 12 Bulan)	UB	12	83,160,000	12	32,392,000	12	34,100,000	6	15,195,000	6	17,724,800	12	32,919,800	100.00%	96.54%	<	24	65,311,800	200.00%	78.54%	BAPPEDA	P
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (2 unit x 12 Bulan)	UB	24	126,380,205	24	49,553,000	24	54,000,000	12	11,522,000	12	41,399,500	24	52,921,500	100.00%	98.00%	<	48	102,474,500	200.00%	81.08%	BAPPEDA	P
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis	5	1,947,605,850	5	36,790,000	5	83,833,600	1	1,300,000	4	62,157,000	5	63,457,000	100.00%	75.69%	<	10	100,247,000	200.00%	5.15%	BAPPEDA	P
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis	8	285,000,000	0	0	8	67,408,900	-	8	49,705,000	8	49,705,000	100.00%	73.74%	<	8	49,705,000	100.00%	17.44%	BAPPEDA	P	
																Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	85.99%				175.00%	45.55%	BAPPEDA				
																		Predikat Kinerja		ST	T				ST	SR	BAPPEDA		
		5	01	2.13		Penataan Organisasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persen	95	85,000,000	0	0	-					-	0.00%	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	BAPPEDA				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	85,000,000	-	-	0	0				-	0.00%	0.00%	<	-	-	0.00%	0.00%	BAPPEDA	K		
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0.00%	0.00%				0.00%	0.00%	BAPPEDA		
																		Predikat Kinerja		SR	SR				SR	SR	BAPPEDA		
																		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)		42.59%	37.24%				84.26%	26.52%	BAPPEDA		
																		PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)		SR	SR				T	SR	BAPPEDA		
		5	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tahapan proses perencanaan tepat waktu	Persen	90	3,994,472,826	100	754,266,804	100	509,385,078	50	82,322,000	50	409,626,720	100	491,948,720	100.00%	96.58%		200	1,246,215,524	222.22%	31.20%	BAPPEDA	
		5	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Perencanaan dan Pendanaan Kota Lhokseumawe	Persen	93	1,737,896,537	6	419,652,814	6	311,136,450	3	54,590,200	3	214,151,920	6	268,742,120	100.00%	86.37%		12	688,394,934	12.90%	39.61%	BAPPEDA	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Laporan Verifikasi Renja SKPK dan Perubahan Renja SKPK	Laporan	10	241,474,025	10	76,798,700	10	40,307,120	-	10	37,672,900	10	37,672,900	100.00%	93.46%	<	20	114,471,600	200.00%	47.41%	BAPPEDA	P	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Laporan	4	156,124,000	4	30,699,000	4	25,000,000	2	8,710,800	2	11,746,980	4	20,457,780	100.00%	81.83%	<	8	51,156,780	200.00%	32.77%	BAPPEDA	P
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum SKPD	Laporan	3	190,224,000	3	34,560,800	3	16,300,000	-	3	7,099,820	3	7,099,820	100.00%	43.56%	<	6	41,660,620	200.00%	21.90%	BAPPEDA	P	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Frekuensi Pelaksanaan Musrenbang Kota Lhokseumawe	Hari	1	390,478,950	1	73,353,160	1	70,734,180	1	45,879,400	0	22,287,000	1	68,166,400	100.00%	96.37%	<	2	141,519,560	200.00%	36.24%	BAPPEDA	P
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Laporan	4	56,726,102	4	17,900,000	4	10,000,000	-	4	1,752,800	4	1,752,800	100.00%	17.53%	<	8	19,652,800	200.00%	34.65%	BAPPEDA	P	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku RKPD dan RKPD-P	Buku	85	702,869,460	85	186,341,154	85	148,795,150	-	85	133,592,420	85	133,592,420	100.00%	89.78%	<	170	319,933,574	200.00%	45.52%	BAPPEDA	P	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100.00%	70.42%				200.00%	36.41%	BAPPEDA		
																		Predikat Kinerja		ST	S				ST	SR	BAPPEDA		
		5	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sumber dana Non APBD	Persen	93	1,702,559,843	3	168,380,540	3	113,348,880	2	23,233,600	1	78,097,700	3	101,331,300	100.00%	89.40%		6	269,711,840	6.45%	15.84%	BAPPEDA	

No	Sasaran Daerah	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RENSTRA pada Tahun 2021 s/d 2022 (RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA S/D Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket							
							Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp	K	Rp			K	Rp					
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16							
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Kesepakatan Doka Murni dan Perubahan	Buku	20	817,643,063	20	69,044,390	20	71,911,600	20	23,233,600	40,668,500	20	63,902,100	100.00%	88.86%	<	40	132,946,490	200.00%	16.26%	BAPPEDA	P								
Jumlah Dokumen Rencana Usulan APBA/APBN							Buku	15	15		15		15		100.00%			30		200.00%			BAPPEDA													
Jumlah Dokumen RK DAK							Buku	10	10		10		10		100.00%			20		200.00%			BAPPEDA													
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Laporan pengelolaan e-planning SIPD Kota Lhokseumawe	Laporan	5	496,411,780	5	99,336,150	5	41,437,280		-	5	37,429,200	5	37,429,200	100.00%	90.33%	<	10	136,765,350	200.00%	27.55%	BAPPEDA	P							
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Lhokseumawe	Buku	20	388,505,000	0	0	0	0		-			-	0.00%	0.00%	<	-	-	0.00%	0.00%	BAPPEDA	K								
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										80.00%	59.73%				160.00%	14.60%	BAPPEDA	
		Predikat Kinerja																										T	R				ST	SR	BAPPEDA	
		5	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	93	554,016,446	3	166,233,450	3	84,899,748	1	4,498,200	2	117,377,100	3	121,875,300	100.00%	143.55%		6	288,108,750	6.45%	52.00%	BAPPEDA								
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Hasil Evaluasi RKPK	Buku	10	186,973,890	10	50,052,050	10	49,744,448		-	10	98,360,600	10	98,360,600	100.00%	197.73%	>	20	148,412,650	200.00%	79.38%	BAPPEDA	P							
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Laporan Monitoring Pembangunan	Buku	10	367,042,556	10	116,181,400	10	35,155,300	5	4,498,200	5	19,016,500	10	23,514,700	100.00%	66.89%	<	20	139,696,100	200.00%	38.06%	BAPPEDA	P							
							Jumlah Buku Laporan Sismontepra	Buku	10		10		5		5		10		100.00%		20			200.00%		BAPPEDA										
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																										100.00%	132.31%				200.00%	58.72%	BAPPEDA	
		Predikat Kinerja																										ST	ST				ST	R	BAPPEDA	
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																										93.33%	87.49%				186.67%	36.58%	BAPPEDA	
		PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																										ST	T				ST	SR	BAPPEDA	
		5	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan	Persen	100	7,008,557,221	100	239,168,930	100	312,002,220		-	100	237,370,400	100	237,370,400	100.00%	76.08%		200	476,539,330	200.00%	6.80%	BAPPEDA								
		5	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	90	1,154,797,216	12	81,907,650	12	67,057,260		-	12	65,436,450	12	65,436,450	100.00%	97.58%		24	147,344,100	26.67%	12.76%	BAPPEDA								
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	12	96,233,101	0	0	0	0					0		-	0.00%	0.00%	<	-	-	0.00%	0.00%	BAPPEDA	K						
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Frekuensi Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	kali	12	56,530,603	0	0	0	0					0		-	0.00%	0.00%	<	-	-	0.00%	0.00%	BAPPEDA	K						
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	7	110,982,600	0	0	0	0					0		-	0.00%	0.00%	<	-	-	0.00%	0.00%	BAPPEDA	K						
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	12	121,186,100	0	0	0	0					0		-	0.00%	0.00%	<	-	-	0.00%	0.00%	BAPPEDA	K						

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RENSTRA pada Tahun 2021 s/d 2022 (RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA S/D Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket							
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	Realisasi >/= /<	K	Rp			K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10	12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16							
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Laporan	12	117,357,690		0	0			0	-	0.00%	0.00%	<	-	-	0.00%	0.00%	BAPPEDA	K						
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Frekuensi Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kali	12	180,985,532	0	0	0	0		0	-	0.00%	0.00%	<	-	-	0.00%	0.00%	BAPPEDA	K						
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	12	193,113,900	0	0	0	0		0	-	0.00%	0.00%	<	-	-	0.00%	0.00%	BAPPEDA	K						
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	12	278,407,690	12	81,907,650	12	67,057,260		12	65,436,450	100.00%	97.58%	<	24	147,344,100	200.00%	52.92%	BAPPEDA	P						
						Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		12.50%	12.20%				25.00%	6.62%	BAPPEDA	
						Predikat Kinerja																		SR	SR				SR	SR	BAPPEDA	
		5	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	90	2,848,060,005	12	37,539,400	12	154,494,960		-	12	82,919,800	12	82,919,800	100.00%	53.67%		24	120,459,200	26.67%	4.23%	BAPPEDA				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Buku LP2KD, RIPPDA dan Buku Surve Potensi Investasi	buku	30	788,970,000	30	37,539,400	30	99,844,960		30	31,650,300	30	31,650,300	100.00%	31.70%	<	60	69,189,700	200.00%	8.77%	BAPPEDA	P				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Frekuensi Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi	Kali	12	504,794,535	0	0	12	15,000,000		12	13,679,000	12	13,679,000	100.00%	91.19%	<	12	13,679,000	100.00%	2.71%	BAPPEDA	P				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	30	499,295,470	0	0	30	15,000,000		30	12,960,000	30	12,960,000	100.00%	86.40%	<	30	12,960,000	100.00%	2.60%	BAPPEDA	P				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Buku Penyusunan Strategis Kemandirian dan Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe	Buku	10	633,000,000	0	0	0	0				0	-	0.00%	0.00%	<	-	-	0.00%	0.00%	BAPPEDA	K				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Frekuensi Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kali	12	211,000,000	0	0		0				0	-	0.00%	0.00%	<	-	-	0.00%	0.00%	BAPPEDA	K				

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RENSTRA pada Tahun 2021 s/d 2022 (RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA S/D Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket					
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/= /<	K	Rp			K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Buku Review Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi	Buku	10	211,000,000	0	0	1	24,650,000		1	24,630,500	1	24,630,500	100.00%	99.92%	<	1	24,630,500	10.00%	11.67%	BAPPEDA	P	
																		Rata-rata Capaian Kinerja (%)	66.67%	51.54%				68.33%	4.29%	BAPPEDA			
																		Predikat Kinerja	S	R				S	SR	BAPPEDA			
		5	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayahahan	Persen	90	3,005,700,000	12	119,721,880	12	90,450,000		-	12	89,014,150	12	89,014,150	100.00%	98.41%		24	208,736,030	26.67%	6.94%	BAPPEDA	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Buku Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Buku	10	424,250,000	0	0	0	0				0	-	0.00%	0.00%	<	-	-	0.00%	0.00%	BAPPEDA	K	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Frekuensi Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kali	12	207,350,000	0	0	0	0				0	-	0.00%	0.00%	<	-	-	0.00%	0.00%	BAPPEDA	K	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Buku Rumah Tidak Layak Huni dan Layak Huni; Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh; Survey Bangunan Negara; Land Bankino	Buku	20	1,189,250,000	20	49,624,490	20	37,800,000			20	37,553,300	20	37,553,300	100.00%	99.35%	<	40	87,177,790	200.00%	7.33%	BAPPEDA	P
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pendampingan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Cipta Karya	Laporan	10	171,250,000	20	34,971,490	10	37,650,000			10	36,806,250	10	36,806,250	100.00%	97.76%	<	30	71,777,740	300.00%	41.91%	BAPPEDA	P
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan	12	143,675,000	0	0	0	0				0	-	0.00%	0.00%	<	-	-	0.00%	0.00%	BAPPEDA	K	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Frekuensi Pendampingan Perencanaan dan Pengendalian Program Bidang Cipta Karya	Kali	12	224,250,000	0	0	0	0				0	-	0.00%	0.00%	<	-	-	0.00%	0.00%	BAPPEDA	K	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Laporan	10	232,175,000	10	35,125,900	0	0				0	-	0.00%	0.00%	<	10	35,125,900	100.00%	15.13%	BAPPEDA	K	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	10	413,500,000	0	0	1	15,000,000			1	14,654,600	1	14,654,600	100.00%	97.70%	<	1	14,654,600	10.00%	3.54%	BAPPEDA	P
																			Rata-rata Capaian Kinerja (%)	37.50%	36.85%				76.25%	8.49%	BAPPEDA		
																			Predikat Kinerja	SR	SR				T	SR	BAPPEDA		
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)	29.17%	25.15%				42.40%	4.85%	BAPPEDA		
																			PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)	SR	SR				SR	SR	BAPPEDA		
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (BIDANG URUSAN) (%)	55.03%	49.96%				104.44%	22.65%	BAPPEDA		
																			PREDIKAT KINERJA (BIDANG URUSAN)	R	SR				ST	SR	BAPPEDA		

No	Sasaran Daerah	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan satuannya		Target RENSTRA pada Tahun 2021 s/d 2022 (RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2022 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA 5/D Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
				Tolok Ukur	Satuan	Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi >/=/<	K	Rp	K	Rp					
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11=9+10		12=11/8			13 = 7+11		14=13/6*100%		15	16	
		5			URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1,531,930,500		98,296,500		76,229,900		-		45,437,500	0	45,437,500	0.00%	59.61%		-	143,734,000	0.00%	9.38%	BAPPEDA			
		5	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya akuntabilitas data kelitbangan dan peraturan	Persen	95	1,531,930,500	75	98,296,500	75	76,229,900		-	75	45,437,500	75	45,437,500	100.00%	59.61%		150	143,734,000	157.89%	9.38%	BAPPEDA		
		5	02	2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Cakupan Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Persen	60	807,562,500	3	76,949,000	3	50,000,000		-	3	29,552,800	3	29,552,800	100.00%	59.11%		6	106,501,800	10.00%	13.19%	BAPPEDA		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Buku Hasil Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Buku	20	90,000,000	-	-	0	0			0	-	0.00%	0.00%	<	-	-	0.00%	0.00%	BAPPEDA	K		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Rentang Waktu Pengelolaan Data Melalui Website Bappeda	Bulan	12	139,750,000	12	17,149,700	7	25,000,000		7	14,785,000	7	14,785,000	100.00%	59.14%	<	19	31,934,700	158.33%	22.85%	BAPPEDA	P	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan e-database Informasi Pembangunan Daerah	Laporan	15	577,812,500	15	59,799,300	10	25,000,000		10	14,767,800	10	14,767,800	100.00%	59.07%	<	25	74,567,100	166.67%	12.91%	BAPPEDA	P	
						Jumlah Laporan Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah	Laporan	5		5		5			5		5		100.00%			10		200.00%		BAPPEDA			
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			75.00%	39.40%				131.25%	11.92%	BAPPEDA	
		Predikat Kinerja																			S	SR				ST	SR	BAPPEDA	
		5	02	2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	Laporan	20	390,688,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		-	-	0.00%	0.00%	BAPPEDA				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Buku Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Buku	25	390,688,000	-	-					-	0.00%	0.00%	<	-	-	0.00%	0.00%	BAPPEDA	K			
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			0.00%	0.00%				0.00%	0.00%	BAPPEDA	
		Predikat Kinerja																			SR	SR				SR	SR	BAPPEDA	
		5	02	2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersedianya data penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Laporan	25	118,680,000	1	21,347,500	1	26,229,900		-	1	15,884,700	1	15,884,700	100.00%	60.56%		2	37,232,200	8.00%	31.37%	BAPPEDA		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	5	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Buku Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Buku	25	118,680,000	25	21,347,500	15	26,229,900		15	15,884,700	15	15,884,700	100.00%	60.56%	<	40	37,232,200	160.00%	31.37%	BAPPEDA	P	
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			100.00%	60.56%				160.00%	31.37%	BAPPEDA	
		Predikat Kinerja																			ST	R				ST	SR	BAPPEDA	
		5	02	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya data pengembangan inovasi dan teknologi di Daerah	Inovasi	1	215,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%		-	-	0.00%	0.00%	BAPPEDA				
	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan TIK	5	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Frekwensi Pelaksanaan Sayembara Inovasi Daerah	Kali	1	215,000,000	-	-					-	0.00%	0.00%	<	-	-	0.00%	0.00%	BAPPEDA	K			
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			0.00%	0.00%				0.00%	0.00%	BAPPEDA	
		Predikat Kinerja																			SR	SR				SR	SR	BAPPEDA	
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PROGRAM) (%)																			43.75%	24.99%				72.81%	10.82%	BAPPEDA	
		PREDIKAT KINERJA (PROGRAM)																			SR	SR				S	SR	BAPPEDA	
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (BIDANG URUSAN) (%)																			43.75%	24.99%				72.81%	10.82%	BAPPEDA	
		PREDIKAT KINERJA (BIDANG URUSAN)																			SR	SR				S	SR	BAPPEDA	
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (PER OPD) (%)																			49.39%	37.47%				88.63%	16.74%	BAPPEDA	
		PREDIKAT KINERJA (PER OPD)																			SR	SR				T	SR	BAPPEDA	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan terutama Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Kota Lhokseumawe, Bab III Bagian Pertama Pasal 3 sampai dengan 3.2, dengan jelas disebutkan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai unsur pendukung tugas walikota dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Oleh karenanya dalam hal kinerja pelayanan yang dimaksudkan adalah kinerja pelayanan perencanaan pembangunan daerah, bukanlah kinerja pelayanan yang langsung berhubungan dengan atau kepada masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2022 Bappeda Kota Lhokseumawe memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah yang pertama, yaitu Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan. Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Lhokseumawe

[illegible]

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Lhokseumawe

[illegible]

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi, namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. belum optimalnya proses perencanaan pembangunan sesuai dengan agenda yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, masalah tersebut disebabkan karena belum meratanya kualitas SDM perencana pada setiap perangkat daerah sehingga koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan belum optimal;
2. belum optimalnya pencapaian program kegiatan pembangunan, masalah tersebut disebabkan oleh kurangnya kualitas alat ukur pengendalian serta kurang optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Penyebab tersebut dilatarbelakangi oleh standar pengendalian belum akuntabel, kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna, serta belum optimalnya kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan. Faktor yang mempengaruhinya adalah adanya regulasi, kemauan masyarakat, dan inisiatif dari pemerintah daerah;
3. belum optimalnya kualitas program kegiatan pembangunan, masalah tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya penggunaan data kinerja sebagai bahan perencanaan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta perencanaan belum berbasis kawasan. Penyebab tersebut dilatarbelakangi oleh adanya standar proses perencanaan yang belum akuntabel, kurangnya ruang untuk masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan;
4. belum optimalnya kapasitas kelembagaan seperti minimnya pemahaman terhadap tupoksi, masalah tersebut disebabkan karena belum tersosialisasinya peraturan tentang tugas dan fungsi;

5. masih kurangnya data dan informasi yang akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan perencanaan, masalah tersebut disebabkan karena belum optimalnya penggunaan SIPD pengolahan data yang akurat pada setiap perangkat daerah;
6. belum adanya peningkatan capaian tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, masalah tersebut disebabkan karena belum meratanya kualitas SDM perencana pada setiap perangkat daerah dan kurangnya pendanaan penyediaan fasilitas kantor.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran RPK 2023-2026 serta terhadap capaian program nasional SPM dan SDGs. Berkaca pada permasalahan yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda di masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi Bappeda dalam jangka 4 tahun mendatang adalah :

1. semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah.
2. perubahan kebijakan perencanaan dari *money follow function* menjadi *money follow programme*.
3. meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya.
4. masih rendahnya proporsi belanja operasi terhadap belanja daerah.

Sedangkan peluang bagi Bappeda dalam melaksanakan tugasnya adalah :

1. semakin strategisnya peran Bappeda sebagai perencanaan dalam menentukan arah pembangunan daerah, sehingga produk perencanaan yang dihasilkan akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
2. perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya;

3. tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah;
4. penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi diperlukan kesamaan pemahaman perangkat daerah terkait pentingnya kebutuhan data yang dilakukan secara berjenjang;
5. konsistensi perencanaan antar waktu diperlukan pendampingan dan koordinasi intensif dalam perencanaan kinerja dan anggaran pada seluruh perangkat daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajaran apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki, sehingga dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran.

Dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada baik dari tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, RKPD Tahun 2024 ditetapkan lebih mengarah kepada 7 prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi;
2. Pendidikan;
3. Pertumbuhan Ekonomi;
4. Kesehatan;
5. Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya;
6. Infrastruktur;
7. Lingkungan Hidup.

Dengan ditetapkannya prioritas pembangunan, maka penetapan skala prioritas pembangunan akan menjadi lebih mudah dan jelas dalam melaksanakan perencanaan, koordinasi, sinkronisasi maupun pelaksanaan perencanaan. Berkaitan dengan prioritas pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai badan yang bertugas sebagai perencana berada pada prioritas pertama yakni Reformasi Birokrasi. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPK Lhokseumawe Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				10,475,282,477	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				8,046,262,628	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				10,475,282,477	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				8,046,262,628	
	PERENCANAAN				9,925,282,477	PERENCANAAN				7,496,262,628	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	7,797,176,800	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen	5,640,310,217	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	15 Dokumen	15,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	15 Dokumen	15,689,380	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	15,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	15,689,380	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4,633,270,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4,496,024,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 Orang/bulan	4,633,270,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 Orang/bulan	4,496,024,000	
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	20,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	20,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	20,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	20,000,000	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	249,207,600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Lhokseumawe	Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	219,131,272	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket	43,067,600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket	43,066,272	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1150 Paket	30,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1150 Paket	29,925,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	25,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	25,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	730 Dokumen	1,140,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	730 Dokumen	1,140,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	150,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	120,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis	1,140,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis	90,338,060	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	350,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	690,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	100,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	90,338,060	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Lhokseumawe	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	524,599,200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Lhokseumawe	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	488,584,505	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	2,990,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan	225,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan	225,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	708 Laporan	296,599,200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	708 Laporan	260,594,505	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis	1,215,100,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis	310,543,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	34,100,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	34,100,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	81,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	90,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	136,444,000	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	500,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	49,999,000	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Kota Lhokseumawe	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak	1,478,105,677	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Kota Lhokseumawe	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak	1,266,495,246	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	6 Dokumen	935,000,000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	6 Dokumen	975,031,721	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	25,000,000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	25,000,000	
9	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	50,000,000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	50,000,000	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	100,000,000	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	145,936,325	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	12 Berita Acara	50,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	12 Berita Acara	50,000,000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	350,000,000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	328,141,606	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	204 Usulan	10,000,000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	204 Usulan	9,929,470	
10	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	350,000,000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	366,024,320	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Kesepakatan Perencanaan Pembangunan Sumber Dana Non APBK	3 Dokumen	150,000,000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Kesepakatan Perencanaan Pembangunan Sumber Dana Non APBK	3 Dokumen	104,914,325	
11	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	75,000,000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	54,551,190	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	15 Orang	75,000,000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	15 Orang	-	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	-	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	50,363,135	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	175,000,000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	131,972,505	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	100,000,000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	79,480,880	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	75,000,000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	52,491,625	
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	3 Dokumen	218,105,677	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	3 Dokumen	54,576,695	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	75,000,000	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	54,576,695	
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	75,000,000	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	-	
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	68,105,677	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Lhokseumawe	Penjabaran Konsistensi Program RPJMK ke dalam RKPK	100 Persen	650,000,000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Lhokseumawe	Penjabaran Konsistensi Program RPJMK ke dalam RKPK	100 Persen	589,457,165	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Lhokseumawe	Periode Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	12 Bulan	185,000,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Lhokseumawe	Periode Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	12 Bulan	170,000,000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	25,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	10,000,000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11 Laporan	20,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11 Laporan	6,500,000	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	10,000,000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	35,000,000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	20,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	20,000,000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	20,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	6,500,000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	10,000,000	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	100,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	72,000,000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Lhokseumawe	Periode Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	12 Bulan	280,000,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Lhokseumawe	Periode Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	12 Bulan	234,998,170	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	80,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	59,999,565	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	20,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1Laporan	19,999,590	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	125,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	99,999,500	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	20,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	19,999,795	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	15,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	14,999,935	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	20,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	19,999,785	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Lhokseumawe	Periode Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	12 Bulan	185,000,000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Lhokseumawe	Periode Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	12 Bulan	184,458,995	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	25,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	24,947,035	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	100,000,000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	99,548,805	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	30,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	29,969,490	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	15,000,000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	14,996,135	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	15,000,000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan		
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	14,997,530	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Kota Lhokseumawe			550,000,000	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Kota Lhokseumawe			550,000,000	
	Program Penelitian dan Pengembangan daerah	Kota Lhokseumawe	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	75 Persen	550,000,000	Program Penelitian dan Pengembangan daerah	Kota Lhokseumawe	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	75 Persen	550,000,000	
17	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	10 Dokumen	200,000,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Lhokseumawe	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	10 Dokumen	200,000,000	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	100,000,000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	100,000,000	

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	50,000,000	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	50,000,000	
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	50,000,000	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	50,000,000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Lhokseu mawe	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	4 Dokumen	100,000,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Lhokseu mawe	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	4 Dokumen	100,000,000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	100,000,000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	100,000,000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Lhokseu mawe	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	9 Dokumen		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Lhokseu mawe	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	9 Dokumen	0	
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen		
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kota Lhokseu mawe	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi di Daerah	2 Dokumen	250,000,000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kota Lhokseu mawe	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi di Daerah	2 Dokumen	250,000,000	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	200,000,000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	200,000,000	

[illegible]

2.5. Penelaahan Usulan Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Desa hingga tingkat Kecamatan. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan. Proses penjarangan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil. Tabel usulan program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	0	-
2	-	-	-	0	-
3	-	-	-	0	-

Pada forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan dari usulan masyarakat yang ditujukan kepada Bappeda selaku Perangkat Daerah maupun usulan pokir. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada Tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Tema RKP Tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Dijabarkan dalam 7 prioritas nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah *Major Project* yaitu :

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Disamping arah dan kebijakan makro tersebut, dalam pelaksanaannya untuk Tahun 2024 RKP (Rencana Kerja Pemerintah) memiliki pedoman 8 arah kebijakan prioritas pembangunan yaitu :

1. pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. penguatan daya saing usaha;
4. revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;

5. pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. percepatan pembangunan ibu kota nusantara;
8. pelaksanaan pemilu 2024.

Selain memperhatikan tema pembangunan juga memperhatikan tema pembangunan Pemerintah Aceh yang tercantum pada RKPA Tahun 2024 yaitu **“Meningkatkan Kualitas SDM dan Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Sipil, Politik, Sosial, Ekonomi Masyarakat dan Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Serentak”**. Tema pembangunan tersebut mempunyai makna bahwa pembangunan Aceh Tahun 2024 diarahkan untuk peningkatan SDM, pemenuhan hak-hak sipil, politik, sosial, ekonomi masyarakat dan mensukseskan agenda politik pemilihan umum secara serentak.

Sementara itu, untuk pencapaian tema pembangunan di atas dirumuskan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2024 yang meliputi :

1. memperkuat ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif;
2. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
3. memperkuat infrastuktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan;
4. penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh;
5. mensukseskan Pemilu serentak dan PON XXI.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Bappeda Kota Lhokseumawe juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Lhokseumawe agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Pemerintah Aceh tersebut di atas. Maka tema pembangunan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe yaitu : “ **Mewujudkan Kota Lhokseumawe Cerdas dalam Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak**”. Dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 yaitu :

1. Reformasi Birokrasi;
2. Pendidikan;
3. Pertumbuhan Ekonomi;
4. Kesehatan;
5. Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya;
6. Infrastruktur;
7. Lingkungan Hidup.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023–2026 yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik** dengan indikator **Indeks Reformasi Birokrasi**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe yaitu **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dan Meningkatkan Pelayanan Publik** dengan indikator sasaran **Nilai Evaluasi SAKIP** dan **Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai "IKM" yang Baik**

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada review Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 sebagai berikut::

**Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Bappeda Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
1.	TUJUAN : - Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	CC
2.	SASARAN : - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi - Meningkatnya Pelayanan Publik - Meningkatkan kualitas kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah - Meningkatnya inovasi daerah - Meningkatnya Layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai "IKM" yang Baik - Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe untuk komponen perencanaan kinerja - Persentase konsistensi dokumen perencanaan Indeks Inovasi Daerah Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	B A 21 100% 38.00 100%

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Walikota Lhokseumawe dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran Kota Lhokseumawe, pada dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe adalah sebagai “*pengarah*” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe mempunyai program sebagaimana terlihat pada tabel 3.1.

Pada Tahun 2024 Bappeda Kota Lhokseumawe melaksanakan 4 program dan 17 kegiatan dan 53 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

- 1) program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan 7 kegiatan dan 16 sub kegiatan;
- 2) program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dengan 4 kegiatan 12 sub kegiatan;
- 3) program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, dengan 3 kegiatan 19 sub kegiatan;
- 4) program penelitian dan pengembangan daerah, dengan 3 kegiatan 6 sub kegiatan;

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.03.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.03.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	KIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						8.046.262.628,00							7.128.592.555,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						8.046.262.628,00							7.128.592.555,00	
	5.01	PERENCANAAN						7.496.262.628,00							7.014.635.055,00	
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	-			100 Persen	5.640.310.217,00						-	5.895.008.060,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			15 Dokumen	15.689.380,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Bappeda Kota Lhokseumawe	-	25.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokume	15.689.380,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Bappeda Kota Lhokseumawe		25.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Bulan	4.496.024.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Aparatur Bappeda Kota Lhokseumawe	-	4.524.992.235,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				840 Orang/ bulan	4.496.024.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Aparatur Bappeda Kota Lhokseumawe		4.524.992.235,00	BAPPEDA

	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			12 Bulan	20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Aparatur Bappeda Kota Lhokseumawe	-	40.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Orang	20.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Aparatur Bappeda Kota Lhokseumawe		40.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			12 Bulan	219.131.272,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Bappeda Kota Lhokseumawe	-	365.121.651,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				80 Paket	43.066.272,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Bappeda Kota Lhokseumawe		52.710.200,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1150 Paket	29.925.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Bappeda Kota Lhokseumawe		44.581.451,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				30 Paket	25.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Bappeda Kota Lhokseumawe		30.000.000,00	BAPPEDA

	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				730 Dokumen	1.140.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Bappeda Kota Lhokseumawe		2.880.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	120.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Bappeda Kota Lhokseumawe		234.950.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			13 Unit	90.338.060,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Bappeda Kota Lhokseumawe	-	75.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	90.338.060,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Bappeda Kota Lhokseumawe		75.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	488.584.505,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Bappeda Kota Lhokseumawe	-	584.659.104,00	BAPPEDA
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30 Laporan	2.990.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Bappeda Kota Lhokseumawe		5.000.000,00	BAPPEDA

5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				84 Laporan	225.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Bappeda Kota Lhokseumawe		266.200.000,00	BAPPEDA
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				708 Laporan	260.594.505,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Bappeda Kota Lhokseumawe		313.459.104,00	BAPPEDA
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			45 Unit	310.543.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Bappeda Kota Lhokseumawe	-	280.235.070,00	BAPPEDA
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	34.100.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Bappeda Kota Lhokseumawe		47.916.000,00	BAPPEDA
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	90.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Bappeda Kota Lhokseumawe		72.819.070,00	BAPPEDA
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	136.444.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Bappeda Kota Lhokseumawe		100.000.000,00	BAPPEDA

	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				8 Unit	49.999.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Bappeda Kota Lhokseumawe		59.500.000,00	BAPPEDA
2	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada	-			Ada Ada/Tidak	1.266.495.246,00						-	560.924.436,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-			17 Dokumen	975.031.721,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe	-	287.833.567,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	25.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		31.740.120,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				2 Dokumen	50.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		40.322.650,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				3 Berita Acara	145.936.325,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		26.250.000,00	BAPPEDA

	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				12 Berita Acara	50.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		15.750.000,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota				3 Berita Acara	328.141.606,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		63.535.889,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				204 Usulan	9.929.470,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		10.500.000,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)				4 Dokumen	366.024.320,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		99.734.908,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi P	Jumlah Dokumen Kesepakatan Perencanaan Pembangunan Sumber Dana Non APBK	-			4 Dokumen	104.914.325,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe	-	100.507.180,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				3 Dokumen	54.551.190,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		75.507.180,00	BAPPEDA

	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	50.363.135,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		25.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan P	Jumlah Doukumen Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-			4 Dokumen	131.972.505,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe	-	141.146.409,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	79.480.880,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		104.233.344,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	52.491.625,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		36.913.065,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	-			1 Dokumen	54.576.695,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe	-	31.437.280,00	BAPPEDA
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				1 Dokumen	54.576.695,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		31.437.280,00	BAPPEDA

3	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMK ke dalam RKPK	-				100 Persen	589.457.165,00							558.702.559,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Periode Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-				12 Bulan	170.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe	-	177.952.559,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		32.952.559,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan															
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					11 Laporan	6.500.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		15.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan															
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					1 Laporan	10.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		15.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan															
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan					1 Laporan	35.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		15.000.000,00	BAPPEDA

	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	20.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		15.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				13 Laporan	6.500.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		15.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				13 Laporan	10.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		30.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	72.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		40.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Periode Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-			12 Bulan	234.998.170,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe	-	185.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	59.999.565,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		30.000.000,00	BAPPEDA

	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	19.999.590,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		20.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				2 Laporan	99.999.500,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		30.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian				3 Laporan	19.999.795,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		60.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	14.999.935,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		25.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	19.999.785,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		20.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Periode Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktrur dan Kewilayahan	-			12 Bulan	184.458.995,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe	-	195.750.000,00	BAPPEDA

	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	24.947.035,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		25.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	99.548.805,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		100.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	29.969.490,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		30.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	14.996.135,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		25.000.000,00	BAPPEDA
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	14.997.530,00	Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		15.750.000,00	BAPPEDA

	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						550.000.000,00							113.957.500,00		
1	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	-				75 Persen	550.000.000,00						-	113.957.500,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-				3 Dokumen	200.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe	-	70.562.500,00	BAPPEDA
	5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah															
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah					1 Laporan	100.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		27.775.000,00	BAPPEDA
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan															
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik					1 Laporan	50.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		26.250.000,00	BAPPEDA
	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan															
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan					1 Laporan	50.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		16.537.500,00	BAPPEDA
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-				1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe	-	0,00	BAPPEDA

	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		0,00	BAPPEDA
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi di Daerah	-			2 Dokumen	250.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe	-	43.395.000,00	BAPPEDA
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		27.037.500,00	BAPPEDA
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Lhokseumawe		16.357.500,00	BAPPEDA
	J U M L A H							8.046.262.628,00							7.128.592.555,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe merupakan perangkat kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe bertugas mempunyai tugas pokok membantu Walikota Lhokseumawe dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan

Sesuai dengan Tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan. Untuk meningkatkan kinerja Bappeda Kota Lhokseumawe maka tujuan yang harus dicapai perlu didukung dengan program dan kegiatan yang meliputi : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari kegiatan Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Pengendalian, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial

dan Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 untuk program dan kegiatan di Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a) peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
- b) tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan;
- c) fasilitasi berbagai forum *multistakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
- d) meningkatnya koordinasi perencanaan *intern* yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *focused group discussion* (FGD);
- e) meningkatnya optimalisasi pemanfaatan potensi daerah yang memperkuat struktur perekonomian;
- f) pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (outcomes)/kegiatan (output) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Bab III, Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe adalah program tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.